

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur dan Jurnal

Arenda, Gita. 2015. skripsi: *Analisis Perbandingan Kebijakan Perencanaan Barang Milik Negara di Indonesia dengan Negara Australia, Singapura, dan Malaysia*. Tangerang Selatan.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.

Government of Australia, Department of Treasury and Finance. *Asset Management Series Part 1*. 1995. Victoria State Government.

Hariyono, Arik.(2007). *Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Hastings. Nicholas A.J. 2010. *Physical Asset Management*. Springer.

Kusuma Dewi, Marietta. 2016. skripsi: *Studi Eksploratif Atas Implementasi Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Pada Tingkat Pengguna Barang*. Tangerang Selatan.

Nazir, Mohammad.2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sehrawat, MS. and JS. Narang. 2001. *Production Manajemen, 3<sup>rd</sup>. Edition*.

Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumardi, Yos. 2013. *Perencanaan Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen*. Bandung.

### **Dokumen Publik dan Peraturan Perundangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

----- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

----- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN.

----- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN.

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

----- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 451/KM.6/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Direktur Barang Milik Negara Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

----- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

-----Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 127/KM.6/2015 tentang Tahapan Pelaksanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga.

----- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 310/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

